

PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

M. Wisnu Pratommi

wisnupratommi015@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Mataram

Saipul Arni Muhsyaf

saipulam@unram.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Mataram

Isnawati

isnawati.isna@unram.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan kausalitas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Alat untuk menganalisis dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai p value yang lebih kecil dari 0,05 ($0,05 > 0,000$).

Kata Kunci: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pengelolaan keuangan daerah

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of regional financial management information systems on the effectiveness of regional financial management at the Central Lombok Regency Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research is descriptive quantitative research with a causality approach. The data collection method in this research uses a questionnaire. The number of samples in this research was 40 employees who worked at the Central Lombok Regency Regional Financial and Asset Management Agency. The tool for analysis in this research uses Partial Least Square (PLS). The results of this research show that the financial management information system has a significant effect on the effectiveness of regional financial management. This is proven by the p value which is smaller than 0.05 ($0.05 > 0.000$).

Keywords: *Regional financial management information system, effectiveness of regional financial management*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi sektor publik dalam mengelola anggarannya dengan berbagai program dan kegiatan dengan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang merupakan entitas dari organisasi sektor publik yang menggunakan dana masyarakat yang berasal dari pajak yang di bayarkan masyarakat sehingga harus memiliki pengelolaan manajemen yang baik (*good governance*), yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam memenuhi harapan masyarakat dan akuntabilitas. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini terdiri dari bab yaitu mengatur ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD dst. Namun pada tanggal 6 Maret 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengganti Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tersebut. Perubahan Peraturan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP Nomor 12 tahun 2019 ini memiliki banyak pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, diantaranya perubahan mendasar pada Struktur APBD (Indoensia, 2019).

Pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud jika pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang dimiliki secara efektif, baik dalam bentuk pengelolaan dana sehingga dapat di jadikan sebagai bahan penilaian dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu hal yang di jadikan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan ialah informasi manajemen. Informasi yang baik merupakan informasi yang dapat memberikan fungsi bagi organisasi untuk dijadikan keputusan di waktu yang akan datang.

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan program di semua aspek sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara nyata dan sempurna dalam pelayanannya kepada masyarakat. Dengan perkembangan pengetahuan teknologi, Kemendagri berupaya meningkatkan program pemerintah dengan meluncurkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Pemendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan cepat pada 14 Oktober 2019. SIPD ini memuat mengenai sistem informasi perencanaan pembagunan daerah, sistem keuangan daerah dan sistem pemerintah daerah lainnya seperti sistem pembinaan dan pengawasan daerah (Indonesia, 2019).

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. SIMDA sendiri digunakan sejak tahun 2011 oleh BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, namun SIMDA memiliki keterbatasan seperti tidak terintegasi sehingga pemerintah pusat tidak bisa memonitor secara langsung aktivitas keuangan dari daerah. Pada tahun 2019 Kemendagri

meluncurkan aplikasi berbasis web Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD, sistem berbasis daring itu merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 70 Tahun 2019, dimana dalam aturan tersebut menginstruksikan Pemda untuk memakai SIPD untuk proses pengelolaan keuangan. Dalam peraturan terbaru, penerapan SIPD berubah menjadi bukan sebuah keharusan Pemda mengimplementasikan di daerah masing-masing, sebab pada tanggal 12 Januari 2021 Kemendagri akhirnya memperbolehkan digunakannya aplikasi selain SIPD secara paralel dengan catatan tetap menginput dalam SIPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (Perbub, 2020).

Pada tahun 2021 BPKAD Kabupaten Lombok Tengah melakukan migrasi sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD, namun berdasarkan informasi yang di dapat dilapangan, implementasi SIPD ini juga masih lamban penggunaannya karena beberapa faktor penentu dari berhasilnya implementasi SIPD, hal itu juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

Nasution (2021), Bagoe (2013), Wartini (2016) dan Adisi (2022) menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD sudah efektif. Namun ada juga beberapa peneliti yang menemukan bukti bahwa penerapan SIPD masih kurang efektif, salah satu peneliti tersebut adalah Ekaputra (2021) yang menunjukkan penerapan SIPD masih kurang efektif, yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan SIPD adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi. Vitriana (2022) juga dalam penelitiannya mengatakan bahwa penerapan SIPD masih kurang optimal.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* mengemukakan bahwa organisasi atau entitas, termasuk sektor publik memiliki berbagai pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam operasi, kebijakan, atau keputusan mereka, dan pihak-pihak ini yang disebut *Stakeholder*. *Stakeholder* bisa termasuk individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi keputusan atau kinerja suatu organisasi.

Freeman (2010) mendefinisikan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) seperti sebuah kelompok atau individu yang dapat memberi dampak oleh hasil tujuan organisasi. Pihak-pihak yang termasuk pemangku kepentingan yaitu masyarakat, bisnis, administrasi publik lain, politisi, parlemen dan lembaga peradilan serta media.

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi sektor publik yang mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya kepada kepala daerah namun juga kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat

Kabupaten Lombok Tengah. Teori stakeholder ini mencakup seluruh elemen yang ada di organisasi sektor publik untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik dimana dalam hal ini lebih ditekankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat.

Konsep Dasar Sistem

Menurut Irviani (2017:12) suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsssur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu dengan yang lain, dan terpadu.

Konsep Dasar Informasi

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti untuk penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau telah diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Irviani, 2017:12).

Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan penggilahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya (Irviani, 2017:12).

Sistem Informasi Keuangan Daerah

UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas. Informasi Keuangan Daerah yang di sampingkan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah

Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Pengelolaan Keuangan

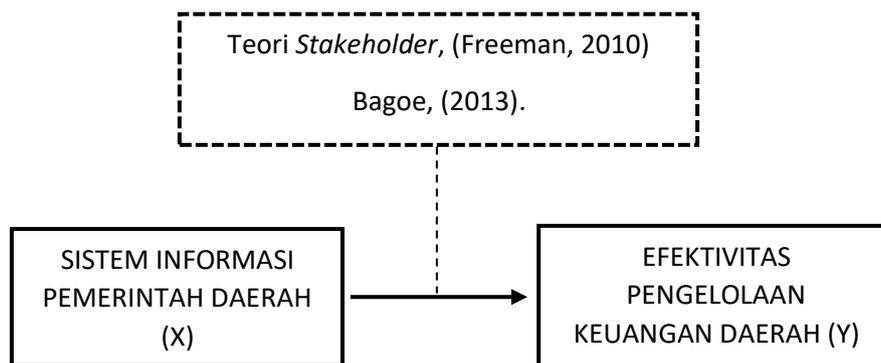
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan, yang meliputi perencanaan, pelaksana, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut PP No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu/berfokus pada kepentingan publik. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan orang banyak. Serta jumlah kontribusi masyarakat yang turut ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan keuangan suatu daerah harus transparan dan akuntabel sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berikut uraian terdahulu yang menjadicaun untuk penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

\	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Yuniarti, (2022)	Pengaruh Penerapan SIPK Dan Kualitas Sdm Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Kuantitaatif	Sistem informasi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Namun berbeda dengan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan.
2	Syahdi, (2018)	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
3	Bago, (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

Sumber: Data Primer Diolah, 2023



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis:

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa pentingnya organisasi untuk merespon kebutuhan dan kepentingan *Stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah lebih tepatnya Kemendagri melakukan terobosan dengan menciptakan aplikasi berbasis web guna menunjang kebutuhan *Stakeholder* dalam proses pengelolaan keuangan, dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Terdapat penelitian terdahulu dari penelitian Bagoë (2013) yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 45,6% terhadap penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam pengujian di antaranya SPI dan SDM yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Koefisien regresi menunjukkan variabel X (penerapan SIPKD) diperoleh sebesar 0.609 dengan arah koefisien positif hal menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Menurut Sugiyono (2016: 37) penelitian kausal adalah hubungan sebab akibat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependent (dipengaruhi). Peneliti ini menjelaskan tentang pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Lokasi Penelitian

Penunjang pembahasan dalam penelitian ini, penulis memusatkan penelitian yang berlokasi pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Populasi Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian adalah pegawai yang berada di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berjumlah 62 orang.

Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, (2016:127) sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan

purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu Sugiyono, 2016:133).

Kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan sample adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang menggunakan aplikasi SIPD
- b. Pegawai yang bertugas mengelola keuangan

Tabel 2 Daftar Populasi

No	Kriteria Responden	Jumlah
1	Pegawai yang menggunakan aplikasi SIPD	40
2	Pegawai yang bertugas mengelola keuangan	40
Jumlah Sample		40

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Dimana kuesioner tersebut di bagikan kepada responden yang berjumlah 63 orang/pegawai pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berisi daftar pernyataan atau pertanyaan yang menjadi hal penting dalam penelitian ini. Kuesioner sebagai instrument pengumpulan data yang merupakan penjabaran dari indikator variabel sbelum digunakan untuk mengmpulkan data lapangan, terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Validitasnya yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dapat di percaya atau diandalkan.

Pengukuran Variabel

Variabel Independen (X)

Sistem informasi pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah dan menyajikan informasi laporan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkann kosep tersebut, dimensi untuk mengukur sistem informasi pengelolaan keuangan yaitu:

- a. Mengolah data merupakan kegiatan memproses data dengan mudah, cepat, dan akurat sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi organisasi/perusahaan. Sehingga indikator pengukuran megolah data yaitu:
 1. Pengelolaan data menjadi lebih mudah
 2. Pengelolaan data lebih cepat
 3. Pengelolaan data lebih akurat
- b. Menyajikan data yaitu menyediakan Informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran pengelolaan keuangan dan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga indikator pengukuran menyajikan data adalah sebagai berikut:
 1. Sebagai bahan pengambilan keputusan
 2. Data dapat di pertanggungjawabkan

Variabel Dependen (Y)

Pengelolaan keuangan berdasarkan PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana pengelolaan keuangan suatu daerah harus transparan dan akuntabel sehingga

tercipta pengelolaan keuangan yang efektif. Berdasarkan konsep tersebut, dimensi untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan yaitu:

- a. Transparan merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Sehingga indikatornya adalah sebagai berikut:
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Penatausahaan
- b. Akuntabel adalah proses pelaporan yang fleksibel dan memudahkan kegiatan pengawasan. Sehingga indikatornya adalah sebagai berikut:
 1. Pelaporan
 2. Pengawasan

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menghitung pengaruh dari sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menguji hipotesis digunakan teknik *Partial Least Square (PLS)* menggunakan aplikasi *Software Smart PLS 4.0*. Berikut adalah langkah yang harus dilalui dalam model PLS yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun model *structural (inner model)*
- b. Merancang model pengukuran (*outer model*)
- c. Merekonstruksi diagram jalur
- d. Pengujian hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 4 *outer loading* setiap indikator

	Variabel Dependen	Variabel Independen
SIPK (X)		
X.1.1		0.828
X.1.2		0.938
X.2.1		0.834
X.3.1		0.880
X.4.1		0.910
X.5.1		0.810
EPK (Y)		
Y.1.1	0.915	
Y.2.1	0.884	
Y.3.1	0.868	
Y.4.1	0.718	
Y.5.1	0.731	

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 sebagai kriteria pengujian validitas konvergen (*convergen validity*) semua indikator pada masing-masing variabel memiliki *outer loading* >0,70, sehingga instrumen penelitian untuk semua variabel bersifat valid.

Uji Realibilitas
Composite Reliability

Tabel 5 *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Sistem informasi pengelolaan keuangan (X)	0,939	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,879	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Indikator instrument penelitian yang mengukur sebuah variabel laten memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki komposit “e” 0,70. Hasil pegujian pada tabel 5 menunjukkan bahwa instrumen penelitian seluruh variabel adalah reliabel karena memiliki nilai *composite reliability* > 0,70.

Uji R Square

Tabel 6 *R-Square* Variabel Dependen

Variabel Laten	R-square
Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,639

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada tabel *R Square* sebesar 0,639. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 63,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

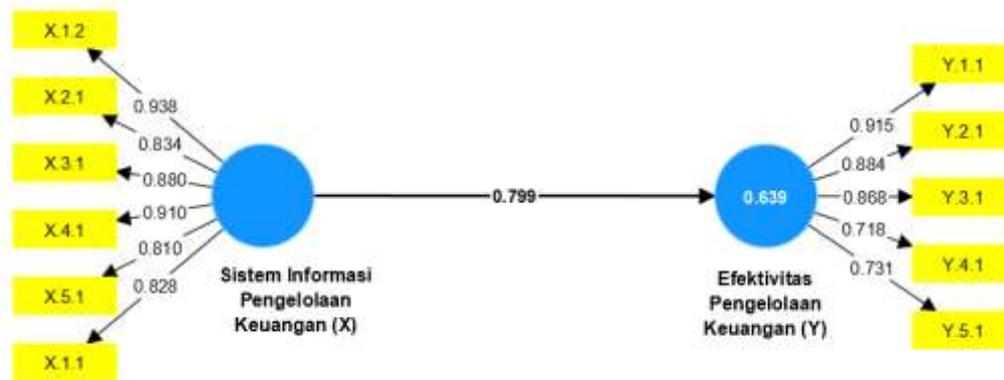
Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

Hubungan variabel	koefisien jalur	t-statistik	P-value	Keterangan
Sistem→Efektivitas	0,799	11,302	0,000	signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh langsung antara variabel sistem informasi pengelolaan keuangan (X) dengan efektivitas pengelolaan keuangan (Y) diperoleh nilai sebesar 0,799 dan p-value sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan semakin tinggi sistem informasi pengelolaan keuangan maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan keuangan diterima. Dengan memperhatikan tanda koefisien jalur positif yang berarti bahwa hubungan antara sistem informasi pengelolaan keuangan dengan efektivitas pengelolaan keuangan adalah searah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sistem informasi pengelolaan keuangan maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan keuangan, hubungan searah tersebut dalam penelitian ini adalah signifikan.



Gambar 2
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak/pengaruh sebesar 63,9% terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sementara sisanya, yaitu sebesar 36,1%, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam pengujian, seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Adisi, C. A. (2022). *Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu.*
- Bagoe, F. (2013). *Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi Pada DPPKAD) Kota Gorontalo.*
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. 21(April), 62–79.*
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic manajemen.* Cambridge University.
- Indoensia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019>

- Irviani, E. Y. A. dan R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi* (E. Risanto (ed.)). Andi.
- Nasution, M. I. (2021). *Analisis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota medan*. 9(77).
- Sugiyono. (2016). *Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder*. Info.Populix.Co.
- Syahdi, M. Z. (2018). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 98–107. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.88>
- Tengah, L. (2020). *Perbup Lombok Tengah Nomer 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah*.
- Vitriana, N. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset*. 1(1), 64–77.
- Wartini, N. N. (2016). *Analisis efektivitas sistem informasi keuangan daerah (sikd) pemerintah kabupaten jembrana*.
- Yuniarti, S. E. (2022). Pengaruh Penerapan Sipk Dan Kualitas Sdm Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas*, 8(1), 78–84. <https://jimutuntad.com/index.php/jimut/article/view/267>